



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH
DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM
YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian rincian subkegiatan yang dapat didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum sesuai dengan usulan dari kementerian/lembaga terkait, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965) diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan dan subkegiatan yang didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dalam anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2026.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR
TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS
BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN
PENGUNAANNYA

A. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM BIDANG
PENDIDIKAN

DAU dukungan bidang pendidikan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut. Jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut meliputi kegiatan dan subkegiatan prioritas SPM serta kegiatan dan subkegiatan prioritas bidang pendidikan.

Khusus untuk Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, jenis kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung yang didanai dari DAU dukungan bidang pendidikan disesuaikan dengan pembagian kewenangan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Unit Sekolah Baru
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Unit Sekolah Baru
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Sekolah Menengah Kejuruan
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
47	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
48	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
49	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
50	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
51	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru
52	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
53	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
54	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
55	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
56	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
57	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
58	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
59	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
60	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
61	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk Pendidikan
62	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
63	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
64	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
65	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
66	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
67	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
68	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
69	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
70	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
71	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
72	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
73	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
74	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
75	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
76	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah

2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Asrama Sekolah
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Fasilitas Parkir
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Kantin Sekolah
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Mebel Sekolah
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Sekolah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemeliharaan Mebel
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Laboratorium
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penataan Ruang/Sudut Baca
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Laboratorium
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Asrama Sekolah
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Fasilitas Parkir
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Kantin Sekolah
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Mebel Sekolah
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
47	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
48	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemeliharaan Mebel
49	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi
50	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
51	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula
52	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
53	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penataan Ruang/Sudut Baca
54	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
55	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
56	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
57	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
58	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
59	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
60	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
61	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
62	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
63	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
64	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
65	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
66	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Asrama Sekolah
67	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Fasilitas Parkir
68	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Kantin Sekolah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
69	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Laboratorium
70	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
71	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
72	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
73	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
74	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
75	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
76	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
77	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
78	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
79	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
80	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
81	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
82	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Mebel Sekolah
83	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
84	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
85	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
86	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
87	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
88	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemeliharaan Mebel
89	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus
90	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi
91	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penataan Ruang/Sudut Baca
92	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
93	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
94	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
95	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
96	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
97	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
98	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
99	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
100	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
101	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
102	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus
103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
104	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
105	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
106	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
107	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah
108	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah
109	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
110	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
111	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
112	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
113	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus
114	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus
115	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
116	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
117	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
118	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
119	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
120	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
121	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi
122	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
123	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi media publik berbahasa daerah
124	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyusunan Ensiklopedia Budaya Daerah
125	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah
126	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyusunan Kebijakan Strategis
127	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi
128	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
129	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
130	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
131	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
132	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembinaan Manajemen Dayah
133	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penelitian dan Pengembangan Dayah
134	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah
135	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
136	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
137	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah
138	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren
139	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma"had Aly

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
140	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma"had Aly
141	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
142	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
143	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah
144	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi
145	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
146	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penetapan Standar Pendidikan Aceh
147	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
148	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh
149	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
150	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan Tambahan DBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
151	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh
152	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan NonFormal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
153	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
154	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
155	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah
156	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami
157	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah
158	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
		Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan
159	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi
160	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
161	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh
162	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
163	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Provinsi

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
7	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
8	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
9	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Masyarakat Hukum Adat
10	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
11	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
12	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
13	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
14	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
15	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
16	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
17	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
18	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Seleksi Atlet Daerah
19	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
20	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
21	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
22	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepramukaan Provinsi
23	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
24	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
25	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
26	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
27	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
28	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
29	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
		Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
30	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
31	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
32	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
33	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
34	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
35	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
36	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
37	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
38	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
39	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal
40	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
41	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Penetapan Cagar Budaya
42	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pelindungan Cagar Budaya
43	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pengembangan Cagar Budaya
44	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pemanfaatan Cagar Budaya
45	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
46	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
47	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
48	Pengelolaan Museum Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
49	Pengelolaan Museum Provinsi	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
50	Pengelolaan Museum Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
51	Pengelolaan Museum Provinsi	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
52	Pengelolaan Museum Provinsi	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
53	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional
54	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
55	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Sosialisasi Adat Istiadat

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
56	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan
57	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh
58	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
59	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Pelatihan Peradilan Adat
60	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
61	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Pembinaan Mediasi Adat
62	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
63	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Kapasitas Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dan Perwakilan
64	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
65	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Rapat Kerja Majelis Adat Aceh
66	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat
67	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
68	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat
69	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat
70	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
71	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
72	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
73	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kesultanan dan Kadipaten
74	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya
75	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
76	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Digital
77	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan
78	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
79	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
80	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
81	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
82	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman
83	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya
84	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Industri Kreatif
85	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
86	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Budaya Bahari

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
87	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram
88	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
89	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal
90	Pendidikan Berbasis Budaya	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan
91	Pendidikan Berbasis Budaya	Kependidikan Kepramukaan
92	Pendidikan Berbasis Budaya	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta
93	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
94	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat
95	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat
96	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat
97	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat
98	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
99	Penyelenggaraan Desa Adat	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan
100	Penyelenggaraan Desa Adat	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan
101	Penyelenggaraan Desa Adat	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan
102	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Pembinaan Prajuru Desa Adat
103	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Pembinaan Pendidikan Pasraman
104	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Adat
105	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
106	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
107	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
108	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
109	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
110	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Perpustakaan Deposit
111	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
112	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
113	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
114	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi
115	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
116	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
117	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
118	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
119	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi
120	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
121	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Penerbitan Katalog Induk Daerah
122	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Penerbitan Bibliografi Daerah
123	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
124	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
125	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
126	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
127	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
128	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
129	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
130	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
131	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
132	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
133	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
134	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
135	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
136	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
137	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
138	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
139	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
140	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
141	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
142	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
143	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
144	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
145	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
146	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
147	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
148	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
149	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
150	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
151	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
152	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pelatihan Mawaris
153	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas
154	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
155	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
156	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Seminar Problematika Syariat Islam
157	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat
158	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
159	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran
160	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Pembinaan Imam Hafid pada Masjid
161	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Pelaksanaan MTQ
162	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional
163	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
164	Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
165	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam
166	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil
167	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan
168	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
169	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pelatihan Takmir Mesjid Seluruh Aceh
170	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
171	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat
172	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong
173	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
174	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam
175	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah
176	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam
177	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman
178	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Bimbingan Teknis Petugasan Informasi dan Teknologi Masjid Raya Baiturrahman
179	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-Quran di Masjid Raya Baiturrahman
180	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturrahman Aceh
181	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
182	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pendidikan Kader Ulama
183	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya
184	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Nadwah/Mubahasah Ilmiah
185	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
186	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Kajian Pedoman Keagamaan
187	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)
188	Silaturahmi Ulama-Ulama	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah
189	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf
190	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota
191	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim
192	Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe
193	Peradaban dan Tamadhun Aceh	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
194	Peradaban dan Tamadhun Aceh	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri
195	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah

4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas SPM yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
47	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini
48	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini
49	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
50	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini
51	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini
52	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
53	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
54	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
55	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
56	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
57	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru
58	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/Praktik Kerja Lapangan untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
59	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru
60	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
61	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
62	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini
63	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
64	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
65	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
66	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
67	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
68	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
69	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
70	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
71	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
72	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
73	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
74	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
75	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
76	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru
77	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
78	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
79	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Unit Sekolah Baru
80	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
81	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
82	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
83	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
84	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
85	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
86	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
87	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah

5. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Mebel Sekolah

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penataan Ruang/Sudut Baca
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Asrama Sekolah
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Fasilitas Parkir
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Kantin Sekolah
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemeliharaan Mebel Sekolah
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penataan Ruang/Sudut Baca
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
47	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
48	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
49	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
50	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
51	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebel Pendidikan Anak Usia Dini
52	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Anak Usia Dini
53	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini
54	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini
55	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini
56	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemeliharaan Mebel Sekolah
57	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
58	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan
59	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha
60	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
61	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penataan Ruang/Sudut Baca
62	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
63	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
64	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
65	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
66	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
67	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
68	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
69	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
70	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Anak Usia Dini
71	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
72	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha
73	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
74	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
75	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
76	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
77	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
78	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
79	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan
80	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
81	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi
82	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Ruang/Sudut Baca
83	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
84	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha
85	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
86	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
87	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
88	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Laboratorium
89	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Sekolah
90	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
91	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
92	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
93	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
94	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat
95	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat
96	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
97	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
98	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
99	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
100	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
101	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
102	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar
103	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
104	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
105	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
106	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
107	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
108	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
109	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
110	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
111	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
112	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
113	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
114	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
115	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
116	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
117	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
118	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah
119	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kabupaten/kota
120	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi media publik berbahasa daerah
121	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah
122	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
123	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
124	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
125	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
126	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembinaan Manajemen Dayah
127	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penelitian dan Pengembangan Dayah
128	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah
129	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
130	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
131	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah
132	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren
133	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
134	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
135	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah
136	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi
137	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
138	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penetapan Standar Pendidikan Aceh
139	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh
140	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan Tambahan DBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh
141	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh
142	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh
143	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
144	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
145	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah
146	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami
147	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah

No	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
148	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan
149	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi
150	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
151	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh
152	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
153	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

6. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
4	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Komunitas Adat Terpencil
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
8	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
9	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
11	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
12	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
13	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
16	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
17	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
18	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
19	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
21	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
22	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
23	Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan
24	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
25	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
26	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
27	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
28	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
29	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
30	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
31	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
32	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
33	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/kota
34	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
35	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
36	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
37	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
38	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota
39	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
40	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
41	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
42	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
43	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
44	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah
45	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
46	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
47	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
48	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
49	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
50	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
51	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
52	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
53	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
54	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
55	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
56	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
57	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
58	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
59	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
60	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
61	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
62	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
63	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
64	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
65	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
66	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
67	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
68	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
69	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
70	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
71	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
72	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
73	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
74	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
75	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
76	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
77	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
78	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya
79	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
80	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
81	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya
82	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
83	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
84	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
85	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
86	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
87	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
88	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
89	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional
90	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
91	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Sosialisasi Adat Istiadat
92	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan
93	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh
94	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang
95	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Penguatan Peradilan Adat
96	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)
97	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Pembinaan Mediasi Adat
98	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat
99	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Kapasitas MAA
100	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
101	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Rapat Kerja MAA
102	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat
103	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
104	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat
105	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
106	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional
107	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pengembangan Kewirausahaan Desa
108	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa
109	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
110	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
111	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
112	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
113	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
114	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
115	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
116	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
117	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
118	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
119	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
120	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
121	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
122	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
123	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
124	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
125	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
126	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
127	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
128	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	Pelaksanaan MTQ
129	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Pendidikan Kader Ulama
130	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah

B. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM BIDANG KESEHATAN

DAU dukungan bidang kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut. Jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut meliputi kegiatan dan subkegiatan prioritas SPM serta kegiatan dan subkegiatan prioritas bidang kesehatan.

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
4	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
13	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Kesehatan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dan lain-lain)
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
13	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
14	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
15	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
16	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
17	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
20	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
21	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
22	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
23	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
24	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
25	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Rumah Sakit
26	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
29	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
30	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
31	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
32	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
33	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
34	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
36	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
37	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
38	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya untuk Wahana Pendidikan
39	Penerbitan Pengaduan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
40	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
41	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
42	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
43	Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
44	Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
45	Penyelenggaraan Akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)

3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu
13	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
14	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
15	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
16	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang
17	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
18	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyediaan Permakanan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
19	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Sandang
20	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
21	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan
22	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang
23	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
24	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
25	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
26	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
27	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
28	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
29	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah

4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas SPM yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
14	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
15	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
17	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
20	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
21	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
22	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

5. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Kesehatan yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah Kabupaten/Kota
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
13	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
14	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
15	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
17	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
20	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
21	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
23	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
24	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
25	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
26	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
27	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
28	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
29	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
30	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
31	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
32	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
33	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
34	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
35	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
36	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
37	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
38	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
39	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
40	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
41	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit
42	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)
43	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
44	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
45	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
46	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
47	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
48	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
49	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
50	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
51	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
52	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
53	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
54	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
55	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
56	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Manajemen Puskesmas
57	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
58	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
59	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
60	Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
61	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
62	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
63	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
64	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
65	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
66	Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota
67	Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota
68	Pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya <i>Zero Harm</i> (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota
69	Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain Kabupaten/Kota

6. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah <i>Zoonosis</i> Prioritas
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
5	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
6	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
7	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
8	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
10	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
11	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
12	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
13	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
14	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
15	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
16	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
17	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
18	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota
19	Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
20	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
21	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
22	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
		dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
23	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana
24	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
25	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
26	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal
27	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana
28	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
29	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
30	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
31	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK
32	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
33	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
34	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
35	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
36	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
37	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
38	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
39	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
40	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
41	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
42	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
43	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
44	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
45	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
46	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
47	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan KB Pria
48	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
49	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
50	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
51	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
52	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
53	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit pengolahan setempat
54	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
55	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
56	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
57	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
58	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
59	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
60	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
61	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah

C. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI UMUM BIDANG PEKERJAAN UMUM

DAU dukungan bidang pekerjaan umum dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sebagaimana tersedia dalam tabel berikut. Jenis kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut meliputi kegiatan dan subkegiatan prioritas Standar Pelayanan Minimal serta kegiatan dan subkegiatan prioritas bidang pekerjaan umum.

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
16	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pekerjaan Umum yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Akhir (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS-3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kabupaten/Kota
2	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan TPA/TPST/SPA
3	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Optimalisasi TPA/TPST/SPA
4	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
5	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPA/TPST/SPA
6	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
7	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan
8	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
9	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku

3. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Provinsi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (SDA WS) Kewenangan Provinsi
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir
4	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai
5	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai
6	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
8	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
11	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Sungai
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem <i>Drainase</i> Perkotaan
13	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
14	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
15	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
16	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
17	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
18	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
19	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
20	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung
21	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
22	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Unit Air Baku
23	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
24	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
25	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
26	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
27	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
28	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Unit Air Baku
29	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
30	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi
31	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
32	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
33	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
34	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
35	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bendung Irigasi
36	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
37	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
38	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
39	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
40	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi
41	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
42	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
43	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
44	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
45	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
46	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
47	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
48	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
49	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi
50	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
51	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
52	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
53	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
54	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
55	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
56	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air
57	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi
58	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
59	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jembatan
60	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan
61	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jembatan
62	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi
63	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jembatan
64	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi Jalan
65	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan
66	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan
67	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
68	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Terowongan/Tunnel
69	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
70	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penggantian Jembatan
71	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Underpass
72	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan
73	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan <i>Flyover</i>
74	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pelebaran Jalan Menuju Standar
75	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
76	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan
77	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
78	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengelolaan Leger Jalan

4. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Standar Pelayanan Minimal yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
16	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
18	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
19	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
20	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
21	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di daerah Kabupaten/Kota
22	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
23	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
24	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
25	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
26	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
27	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
28	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
29	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa
30	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
31	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
32	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
33	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
34	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit pengolahan setempat
35	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
36	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

5. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Bidang Pekerjaan Umum yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
3	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
4	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
5	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa
6	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
7	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
8	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

6. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendungan
3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai
4	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
5	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kanal Banjir
6	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
8	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Breakwater
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendungan
11	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Rehabilitasi Tanggul Sungai

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
12	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
13	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
14	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Kanal Banjir
15	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Breakwater
16	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tanggul Sungai
17	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
18	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kanal Banjir
19	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Revitalisasi Danau
20	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai
21	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
22	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
23	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
24	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
25	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
26	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
27	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
28	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai
29	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota
30	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
31	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
32	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan danau
33	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
34	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
35	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
36	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
37	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
38	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
39	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
40	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
41	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
42	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
43	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
44	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
45	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
46	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
47	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
48	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
49	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
50	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
51	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
52	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
53	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
54	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
55	Pembayaran cicilan pokok dan bunga atas Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
56	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R
57	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
58	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
59	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
60	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah	Pembangunan Unit Air Baku
61	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah	Rehabilitasi Unit Air Baku
62	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah	Rehabilitasi Embung
63	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
64	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
65	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
66	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
67	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
68	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi
69	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar)	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
70	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
71	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
72	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
73	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
74	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Bendung Irigasi
75	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
76	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
77	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
78	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
79	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
80	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi
81	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
82	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
83	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
84	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
85	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
86	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
87	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
88	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
89	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
90	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
91	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
92	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air
93	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
94	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha (Seribu Hektar) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
95	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan
96	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
97	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
98	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penggantian Jembatan
99	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan
100	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan
101	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan
102	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Flyover</i>
103	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
104	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar
105	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan
106	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan
107	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan
108	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
109	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jembatan
110	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
111	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Subkegiatan
112	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Terowongan/Tunnel
113	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan
114	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan <i>Underpass</i>
115	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jembatan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA